



**WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI ARNIS

Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Padang Panjang, 2 Januari 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS



PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	OPD PENANGGUNG JAWAB
T1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	1. Indeks Pembangunan Manusia	angka	82,4	BAPPEDA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Kesehatan, Dinas Porapar, Dinas Sosial PPKB PPPA
S1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah	tahun	15,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Rata-rata Lama Sekolah	tahun	12,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan	%	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	97,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5. Usia Harapan Hidup	tahun	77,01	Dinas Kesehatan
S3. Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	6. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	1,56	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	7. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	1,06	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	8. Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	32,28	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
S4. Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	9. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	71,00	Dinas Sosial PPKB PPPA
	10. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibanga)	angka	66,66	Dinas Sosial PPKB PPPA
	11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	98,35	Dinas Sosial PPKB PPPA
T2. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,95	BAPPEDA, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial PPKB PPPA
	3. Tingkat Kemiskinan	%	4,11	Bappeda, Dinas Sosial PPKB PPPA
	4. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,93	DPMTSP
	5. Indeks Ketahanan Pangan	angka	89,23	Dinas Pangan dan Pertanian
S5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	12. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,73	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah
	13. Rasio PDRB Perdagangan Besar, Kecil dan Eceran	%	18,43	Bappeda, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	OPD PENANGGUNG JAWAB
S6. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	14. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3	Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
	15. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,60	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
S7. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	16. Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,34	DPMPTSP
	17 Nilai Investasi	Milyar Rupiah	75,00	DPMPTSP
S8. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	18. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	140,78	DPMPTSP
	19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,40	DPMPTSP
S9. Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	20. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu orang	2.368	Bappeda, Dinas Sosial PPKB PPPA
S10. Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan	21. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,26	Bappeda, Dinas Pangan Pertanian
	22. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	5,29	Dinas Pangan dan Pertanian
T3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	6. Indeks Reformasi Birokrasi	angka	81,78	BAPPEDA, Inspektorat, Setdako, BPKD, BKPSDM, DPK, Diskominfo, Unit Pelayanan Publik
S11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	23. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	angka	3,39	Setdako (Bagian Pemerintahan)
	24. Indeks Pelayanan Publik	angka	4,22	Setdako
	25. Indeks Reformasi Hukum (Angka)	angka	98,77	Setdako (Bagian Hukum)
	26. Nilai AKIP Kota	angka	69,48	Bappeda, Setdako, Inspektorat
	27. Indeks Pemerintahan Digital	angka	1,89	Diskominfo
	28. Indeks Inovasi Daerah	angka	82,81 (Sangat Inovatif)	BAPPEDA
	29. Indeks Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK)	angka	79,00	Inspektorat
	30. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	74,00	BAPPEDA
S12. Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan da set daerah	31. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	angka	65,73	BPKD
	32. Indeks Pengelolaan Aset Daerah	angka	2,30	BPKD
	33. Indeks Profesionalitas ASN	angka	87,20	BKPSDM
S13. Meningkatnya profesionalisme ASN	34. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,31	BPKD
	35. Nilai Pendapatan Asli Daerah	Milyar Rupiah	136,790	BPKD

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	OPD PENANGGUNG JAWAB
T4. Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya	8. Indeks Rasa Aman	angka	62,2	Satpol PP dan Damkar, Dinas Sosial PPKB PPPA, Setdako, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S15. Meningkatnya Ketentraman dan Keterlibatan Umum	36. Persentase penurunan pelanggaran perda	%	2,55	Satpol PP dan Damkar
	37. Indeks Harmoni	angka	72,00	BPBD Kesbangpol
S16. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	38. Angka PPKS (Angka)	angka	3,21	Dinas Sosial PPKB PPPA
S17. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	39. Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	%	88,00	Setdako
	40. Persentase objek pemajuan objek kebudayaan	%	67,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
T5. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tanggung bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan	9. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	angka	95,70	Setdako
	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	77,71	Dinas Perkim LH
S18. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses infrastruktur serta hunian layak	41. IKLI KePUan	angka	96,91	Dinas PUPR
	42. IKLI Perkim	angka	96,95	Dinas Perkim LH
	43. IKLI Perhubungan	angka	96,90	Dinas Perhubungan
	45. Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	75,97	Dinas Perkim LH
S19. Meningkatnya kualitas	44. Indeks Kualitas Udara	angka	78,78	Dinas Perkim LH
	46. Indeks Kualitas Air	angka	72,62	Dinas Perkim LH
	47. Indeks Kualitas Lahan	angka	69,58	Dinas Perkim LH
S21. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	48. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (angka	0,38	BPBD Kesbangpol

No.	Sasaran/Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 294.323.466.505,00	Setdako, Setwan, Inspektorat, Disdikbud, Dinkes, PUPR, Perkim LH, SatpolPP, Dinsos, Dishub, Capil, Kominfo, DPMTSP, DPK, Dispangan, Perdagkop, BAPPEDA, BPKD, BKPSDM, RPBD, PPT, PPR
2	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 9.431.242.299,00	Setdako
3	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.067.870.300,00	Setdako
4	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 11.745.460.420,00	Sekwan
5	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 498.214.000,00	Inspektorat
6	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 204.389.000,00	Inspektorat
7	Pengelolaan Pendidikan	Rp 24.715.669.741,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Pengembangan Kebudayaan	Rp 239.719.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 19.478.173.937,00	Dinas Kesehatan
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 509.745.800,00	Dinas Kesehatan
11	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 457.930.870,00	Dinas Kesehatan
12	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.385.800.050,00	Dinas Kesehatan
13	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 2.140.524.000,00	Dinas PUPR
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 697.975.000,00	Dinas PUPR

No.	Sasaran/Program	Anggaran	Keterangan
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 557.070.000,00	Dinas PUPR
16	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.917.150.825,00	Dinas PUPR
17	Penataan Bangunan Gedung	Rp 894.539.400,00	Dinas PUPR
18	Penyelenggaraan Jalan	Rp 7.385.915.000,00	Dinas PUPR
19	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 43.762.287,00	Dinas PUPR
20	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 222.914.000,00	Dinas PUPR
21	Pengembangan Perumahan	Rp 197.082.195,00	Dinas Perkim LH
22	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 2.379.322.600,00	Dinas Perkim LH
23	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 500.000.000,00	Dinas Perkim LH
24	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 171.718.900,00	Dinas Perkim LH
25	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 828.276.250,00	Dinas Perkim LH
26	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 102.136.000,00	Dinas Perkim LH
27	Pengelolaan Persampahan	Rp 5.262.745.000,00	Dinas Perkim LH
28	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 174.742.800,00	Satpol PP dan Damkar
29	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 160.615.800,00	Satpol PP dan Damkar
30	Pemberdayaan Sosial	Rp 1.089.099.950,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
31	Rehabilitasi Sosial	Rp 632.842.700,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
32	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 314.594.600,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
33	Penanganan Bencana	Rp 40.600.000,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
34	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 37.147.000,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
35	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 228.433.000,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
36	Perlindungan Perempuan	Rp 97.404.700,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
37	Pemenuhan Hak Anak	Rp 40.000.000,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
38	Perlindungan Khusus Anak	Rp 436.422.000,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
39	Pengendalian Penduduk	Rp 54.789.900,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
40	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 284.575.000,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
41	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 1.120.100.000,00	Dinas Sosial, PPKB PPPA
42	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 3.572.206.460,00	Dinas Perhubungan
43	Pendaftaran Penduduk	Rp 102.538.800,00	Dinas Dukcapil
44	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 31.176.020,00	Dinas Dukcapil
45	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.612.282.400,00	Dinas Kominfo
46	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 876.524.000,00	Dinas Kominfo
47	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 7.770.000,00	Dinas Kominfo
48	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 303.330.000,00	Dinas Kominfo
49	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp 289.500.000,00	Dinas DPM PTSP
50	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 143.086.300,00	Dinas DPM PTSP
51	Hubungan Industrial	Rp 449.988.000,00	Dinas DPM PTSP
52	Promosi Penanaman Modal	Rp 39.773.000,00	Dinas DPM PTSP
53	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 132.906.900,00	Dinas Porapar
54	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 2.457.974.910,00	Dinas Porapar
55	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 10.000.000,00	Dinas Porapar
56	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 1.182.280.200,00	Dinas Porapar
57	Pemasaran Pariwisata	Rp 897.059.500,00	Dinas Porapar
58	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp 19.505.000,00	Dinas Porapar
59	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 414.585.800,00	Dinas Porapar
60	Pembinaan Perpustakaan	Rp 539.999.950,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
61	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 60.000.100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
62	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 99.060.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
63	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 9.998.100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
64	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 85.491.425,00	Dinas Pangan dan Pertanian
65	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 25.515.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Sasaran/Program	Anggaran	Keterangan
66	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 331.744.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
67	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 19.239.700,00	Dinas Pangan dan Pertanian
68	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 68.991.500,00	Dinas Pangan dan Pertanian
69	Penyuluhan Pertanian	Rp 140.049.250,00	Dinas Pangan dan Pertanian
70	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 43.561.200,00	Dinas Perdagkop UKM
71	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 100.000.000,00	Dinas Perdagkop UKM
72	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 7.311.500,00	Dinas Perdagkop UKM
73	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.664.412.500,00	Dinas Perdagkop UKM
74	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 39.538.500,00	Dinas Perdagkop UKM
75	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 430.897.500,00	Dinas Perdagkop UKM
76	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 67.250.000,00	Dinas Perdagkop UKM
77	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 2.265.200,00	Dinas Perdagkop UKM
78	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 188.733.800,00	BAPPEDA
79	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 163.021.350,00	BAPPEDA
80	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 179.900.760,00	BAPPEDA
81	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 3.257.864.200,00	BPKD
82	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 151.526.000,00	BPKD
83	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 428.789.650,00	BPKD
84	Kepegawaian Daerah	Rp 510.228.400,00	BKPSDM
85	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 977.265.300,00	BKPSDM
86	Penanggulangan Bencana	Rp 691.850.750,00	BPBD Kesbangpol
87	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 695.151.550,00	BPBD Kesbangpol
88	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 2.172.559.916,00	BPBD Kesbangpol
89	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 51.860.000,00	BPBD Kesbangpol
90	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 109.902.000,00	BPBD Kesbangpol
91	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 7.193.887.780,00	Kecamatan
92	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.887.675.000,00	Kecamatan
93	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.239.000,00	Kecamatan
94	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 8.240.000,00	Kecamatan
	TOTAL	Rp 428.022.689.000,00	

Padang Panjang, 2 Januari 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS